

## TAJUK RENCANA

### Menakar Kualitas Pilkada di DIY

PILKADA 2024 di seluruh wilayah Tanah Air yang digelar Rabu 27 November berlangsung relatif aman dan lancar. Inilah untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pesta demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara serentak. Kita melihat antusiasme masyarakat untuk berbondong-bondong menuju TPS guna memberikan suaranya juga cukup tinggi.

Kita bersyukur perhelatan akbar demokrasi lokal bisa berjalan aman, nyaris tanpa gangguan berarti. Tentu ini sangat berdampak pada kualitas demokrasi yang sedang kita bangun. Bahwa di sana-sini masih ada kekurangan atau kecurangan, seperti serangan fajar atau money politic, tentu sudah ada mekanisme untuk menanganinya, baik melalui Bawaslu maupun gugatan ke pengadilan atau Mahkamah Konstitusi (MK).

Tentu tak mungkin mewujudkan Pilkada serentak yang seratus persen sempurna. Harapannya, kekurangan itu tidak menggerus kualitas demokrasi yang kita cita-citakan. Pun kita mengharapkan kontestasi berjalan secara fair dan bermartabat. Lazimnya, dalam sebuah kontestasi, ada yang menang dan kalah, itu hal biasa dalam demokrasi.

Khusus di DIY yang meliputi empat kabupaten dan satu kota, kita bersyukur, secara umum pelaksanaan Pilkada berlangsung aman dan lancar. Tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih juga cukup tinggi sehingga mampu menggambarkan kualitas demokrasi lokal di DIY.

Ini tak lepas dari kerja keras penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu, serta kelompok pemantau maupun aparat keamanan baik dari jajaran Polri maupun TNI yang mengamankan jalannya pesta demokrasi lokal ini. Lebih penting lagi, masyarakat DIY relatif memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga mampu memilih berdasar hati nurani tanpa tekanan atau paksaan dari pihak

manapun. Kita harapkan siapapun yang memenangkan kontestasi Pilkada ini, dapat merangkul semua pihak, termasuk pihak yang kalah, untuk membangun daerahnya. Sebab, kita yakin, program yang mereka tawarkan selama kampanye, sangat bagus untuk diterapkan. Dengan berakhirnya Pilkada, semua kembali bersatu membangun daerah masing-masing.

Pilkada bukan sekadar kontestasi personal tapi juga kontestasi program. Kepala daerah terpilih harus mengakomodasi gagasan kontestan lain sepanjang konstruktif dan bermanfaat bagi kemajuan daerahnya. Yang menang tidak jomawa atau 'ngasorake' yang lain, sedang yang kalah juga tidak berkecil hati, karena mereka masih bisa berkontribusi dalam membangun daerah.

Soal siapa yang unggul dalam kontestasi Pilkada tentu masih harus menunggu pengumuman resmi dari KPU. Meski demikian kita juga menghormati lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count sebagaimana lazim digunakan dalam kontestasi pemilu.

Dalam hitung cepat memang sudah terlihat siapa yang unggul, bahkan dalam beberapa menit setelah TPS ditutup. Namun dalam perhitungan resmi kita tetap merujuk pada mekanisme manual yang dilakukan KPU. Setidaknya, dalam beberapa hari ke depan masyarakat sudah dapat melihat hasilnya.

Lebih dari itu, kita mengapresiasi semua pihak, baik penyelenggara Pilkada, kontestan serta masyarakat pemilih yang telah menggunakan haknya sehingga demokrasi berjalan sesuai relnya dalam suasana yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut sekaligus juga bisa menjadi indikator untuk menakar kualitas Pilkada di DIY. Mudah-mudahan DIY menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan Pilkada yang aman, damai dan bermartabat. □ - d

# Pilkada dan Janji Politik

## Angga T Sanjaya

Menurut catatan William J Prior dalam *An Introduction to Ancient Greek Ethics* (2017), kaum Sofis adalah kelompok orang melakukan perjalanan dari kota ke kota di Yunani, menawarkan pengajaran dengan biaya tertentu. Apa yang mereka ajarkan bervariasi, namun mereka paling dike-



KR-JOKO SANTOSO

Kultur kampanye demikian memang menjadi normalitas dan aksioma bagi pesta Pemilu maupun Pilkada. Berbagai janji politik, siasat retorika, dan citra simbolis pemimpin yang merakyat, seolah menjadi atributif fundamental bagi seorang calon pemimpin. Hal ini tentu sah saja. Bagaimanapun, kita perlu objektif bahwa berkampanye pada dasarnya proses pemasaran, di mana para kandidat menampilkan diri mereka sebagai produk, membedakan diri mereka dari produk lain dan membuat proposal tentang bagaimana mereka akan bekerja jika mereka mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin. Inilah sebabnya mengapa janji kampanye menjadi bagian penting dari proses pemilihan.

Masalahnya, segala sesuatu yang diwacanakan sebagai janji, saat itu juga telah memasuki ruang etis. Maka jika suatu janji tak mampu ditepati, bukankah seseorang dapat dianggap ingkar dan pembohong? Padahal dalam situasi kompetisi macam Pilkada, secara psikologis, siapapun dapat dengan mudah menebarkan janji hiperbolis dan tak masuk akal, ketika esang diri (ego) diliputi hasrat (id) untuk memenangkan pemilihan. Padahal sebagaimana riset Theodoros Ntonias, dkk., *Campaign Promises, Political Ambiguity, and Globalization* (IGCC, 2024), sejatinya pemimpin dan partai-partai cenderung kurang mampu menepati janji kampanye ketika mereka memasuki pemerintahan di negara-negara yang terpapar globalisasi ekonomi dan mereka juga menjadi kurang responsif terhadap opini publik.

Penurunan tajam dalam kondisi ekonomi juga menghambat kemampuan partai-partai yang berkuasa untuk memenuhi janji-janji mereka, karena kebijakan-kebijakan. Dalam situasi inilah (ketika janji-janji tak mampu ditepati), penulis teringat pada beberapa orang di era Yunani Kuno yang dikenal dengan atribut eöofisi.

nal karena mengajarkan retorika, seni berbicara di depan umum, dan seni terkait kepemimpinan politik. Di sebagian besar kota Yunani pada saat itu, khususnya di negara demokrasi seperti Athena, keunggulan manusia (kebakikan) terkait erat dengan kepemimpinan politik. Untuk menjadi pemimpin politik, seseorang harus pandai berbicara di depan umum, untuk meyakinkan warga bahwa pandangan dan kebijakan politiknya benar. Jadi, banyak orang menginginkan apa yang dijual kaum Sofis.

Masalahnya, beberapa hal yang diajarkan kaum sofis seringkali meneros aspek etika yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang orator ataupun pemimpin. Tengoklah catatan *Pengantar Sejarah Filsafat Yunani: Sofisme* karya Setyo Wibowo mengenai Giorgias dalam perspektif berikut; persuasi, kata Giorgias, "memiliki kekuatan yang sama, tetapi tidak dalam bentuk yang sama, sebagai paksaan," dan ia memiliki kekuatan ini berdasarkan keterampilan yang diperoleh (teknik) pembicara, terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakannya (2014).

Dari perspektif inilah, kita dapat menarik konklusif mengenai Giorgias, bahwa ia semacam sampel negatif bagi matinya kebenaran dan etika. Kita bisa saja menuntut calon pemimpin untuk tidak melakukan demikian, namun realitasnya kata-kata seringkali menguasai pemilikinya. Sebagaimana janji-janji yang disampaikan, jawaban-jawaban dalam setiap debat, semuanya terintegrasi dengan kemungkinan-kemungkinan distorsi antara ucapan dan realitas.

Sebagaimana dinukil dari tulisan Michael Schmidt dalam *Campaign Promises and the Economy* (2024), janji-janji untuk menciptakan lapangan kerja sangat populer bagi kandidat yang berkampanye, terutama jika lingkungan ekonomi saat ini lemah dan pengangguran menjadi perkara utama. Sialnya, perspektif tersebut seolah menemukan relevansinya dengan masyarakat kita hari ini.

Namun demikian, janji-janji politik tersebut bersifat kontingental, kausalitatif, dan selalu terikat pada dampak dan konsekuensi. Sebab jika tak menemukan korespondensi terhadap realitas dan tindakan pembuktian, kita segera dapat menyimpulkan bahwa semua

ucapan saat kampanye hanyalah janji-janji manis yang menipu. Demikian, eömongan dan janji yang berlebihan itu berbahaya dan bahkan paslon dengan niat terbaik pun bisa kesulitan mewujudkannya.

Untuk itu, mari kita lihat realisasi janji kampanye yang dibuat oleh kandidat dan apakah mereka tak lebih dari seorang eöofisi? (\*)-d

\*)**Angga T Sanjaya**, Dosen Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, UAD.

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Lithbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasro Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkryk23@yahoo.com, iklandkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

**Wartawan:** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkap kartu pers/surat tugas.

## Polisi Tembak Polisi

### Baharuddin Kamba

DI ERA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kasus polisi tembak polisi setidaknya sudah dua kali terjadi. Dulu ada kasus Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menembak ajudannya, Brigadir J, dan bahkan merekayasa kematian bawahannya tersebut. Kali ini terjadi di Mapolres Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. Di mana AKP Dadang Iskandar (Kabag Ops Polres Solok Selatan) menembak AKP Riyanto Ulil Anshar (Kasatreskrim Polres Solok Selatan) diduga karena merasa terusik dengan tindakan AKP Riyanto yang mengungkap adanya tambang ilegal di wilayah Solok Selatan, dengan cara menembak kepala korban dari jarak dekat. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

### Bekingan Aparat

Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan membuktikan adanya oknum aparat kepolisian yang membekingi tambang ilegal di wilayah tersebut. Kasus ini bukti bahwa ada oknum aparat kepolisian, dalam hal ini AKP Dadang Iskandar, yang hendak melindungi dan memiliki kepentingan dengan adanya tambang ilegal. Padahal, tambang ilegal jelas perbuatan melanggar hukum, merusak lingkungan tetapi justru ada oknum aparat kepolisian yang membekingi.

Bukan cerita baru ada oknum yang membekingi tempat-tempat tertentu misalnya tambang ilegal. Tentu tidak gratis tetapi harus memberikan setoran uang untuk melindungi pemilik tambang ilegal tersebut. Perputaran uang yang cukup tinggi dan aparat kepolisian tahu ada tambang ilegal namun merasa di zona aman dengan upeti atau setoran dari pelaku penambang ilegal, contohnya.

Sehingga ketika ada polisi baru yang ingin mengusik lahan tambang ilegal ini, maka polisi lama yang sudah

ngetem lama di lokasi tambang ilegal tersebut merasa terganggu sehingga cara brutal dengan menembak sesama rekan polisi pun dilakukan.

Kasus polisi tembak polisi harus dituntaskan, tidak hanya tindak pidana berupa penembakannya saja, tetapi juga latar belakang, yakni bekingan tambang ilegal, harus juga dituntaskan. Uang mengalir ke siapa saja harus ditelusuri karena jarang pemain tunggal dalam urusan beking tambang ilegal. Pasti melibatkan banyak pihak untuk saling melindungi mafia kejahatan ini.

### Harus Dievaluasi

Pimpinan institusi polri harus bersedia membongkar akar masalahnya. Apakah penembakan karena hubungan personal polisi antara polisi, atau karena masalah tambang dan rebutan proyek. Dari objek perkara, subjek pelaku apakah si pelaku masih mampu menggunakan senjata, sejauh mana kepribadiannya selama ini? Ini harus dievaluasi sehingga menjadi atensi setiap polisi di Indonesia bahwa seseorang sebenarnya masih mampu atau tidak, karena sangat berbahaya ketika seseorang memegang senjata, tapi tidak mampu mengendalikan diri apalagi dalam keadaan emosi. Sehingga tidak setiap anggota polisi boleh memegang senjata api. Tes psikologi secara rutin terhadap anggota polisi yang memegang senjata api sangat perlu dilakukan.

Kalau kita membaca fenomena seperti itu (beking aparat) bisa dimengerti apalagi kalau daerah-daerah tambang. Tapi tindakan polisi menembak polisi itu

bukan suatu hal yang menjadikan alasan pembenar untuk melakukannya. Karena kemampuan untuk mengendalikan bagi polisi membawa senjata api merupakan hal sangat penting.

Karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh dan tuntas bagi anggota Polri yang membawa senjata api. Masalah rebutan proyek sesama aparat polisi itu sudah sering terjadi, tapi ketika mampu membawa senjata tapi tidak mampu mengendalikan diri, ini menjadi hal yang penting untuk dievaluasi.

Pimpinan institusi Polri perlu segera untuk melakukan evaluasi. Salah satunya melalui transparansi pada semua level program. Karena sebaik apapun pendidikan dan pelatihan kepada SDMnya akan selalu ada penyimpangan, karena itu butuh ketegasan tindakan disiplin, sekaligus penegakan hukum selain tuntutan bukan tontonan dari pimpinan. Semoga kasus polisi tembak polisi tidak terulang lagi. (\*)-d

\*)**Baharuddin Kamba**, Kadiv Humas Jogja Police Watch.

## Pojok KR

SPBU nakal rugikan konsumen Rp 1,4 miliar pertahun.

- Itu yang ketahuan. \*\*\*

Polres Kulon Progo bongkar sindikat penjualan bayi.

- Perketat pengawasan. \*\*\*

Polisi tembak polisi di Solok Selatan, terancam hukuman berat.

- Perlu evaluasi penguasaan senjata.

Berita